

## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 9 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

Anniza Cahya Kusuma, Aufarul Marom, Dyah Lituhayu  
Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jl.Prof Soedharto SH, Kampus Tembalang , Semarang  
Email : [annizacahyakusuma@gmail.com](mailto:annizacahyakusuma@gmail.com)

### **Abstrack**

*Implementation of Perda No. 9 in 2009 about retribution service markets is an effort from the government to provide services for merchants. Levy retribution charged to merchants used to cost a oprasional market and to increase services for merchants. Talk to rate retribution charged by merchants pre-set by the Regional Secretary is assisted the DPPKAD which is calculated by multiplying the number of traders as the areaof floor with a rate of retribution pre-set at Perda.*

*The market is as a place for conducting trading deals. The market function itself is one of the principal means to drive and improve the economy. Markets need to be managed, organized and arranged so that the wheels of the economy community area can run smoothly. Retribution is charged to every trader who utilize the facilities of the market. Rate retributionare different, determined by class and place the used market. Occupies a place in the trade market, traders must also obtain a trade license issued by the placement department of industry and commerce. This type of research used in this study is qualitative research with qualitative descriptive method that aims to describe, explain and analyze.*

*An informantwho concerned in the implementation of perda is nameli disperindag, UPTD Puri market already implementing regulation 9 of 2009 but still appears constraints in the implementation of the levy charges eventually hamper the realization of the income levy income levy charges that are not in accordance with pre-determined targets. Ineffectiveness of socialization has been done by the Disperindag and UPTD market also makes some traders there is no pleasure to pay the levy. An informant who is involved also came out differences of opinion between disperindag with UPTD Puri market,*

**Keyword: Implementation, regents regulation number 9 year 2009, retributions services market, UPTD Puri market.**

## 1. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan perda No.9/2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar terhadap ketersediaan pelayanan pasar berupa los, kios, dan pelataran di pasar Puri memberikan pedoman bagi pelaksanaan pelayanan pasar agar bisa tercipta suatu mutu peningkatan pelayanan kepada pedagang dan pembeli. Maka dari itu upaya pemerintah daerah guna untuk meminimalisir masalah yang muncul adalah dengan memberlakukan/melaksanakan sistem pungutan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Perda.

Pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar sampai sekarang ternyata masih menemui beberapa permasalahan di lapangan seperti tujuan retribusi pelayanan pasar belum dipahami sepenuhnya oleh aktor yang terlibat, aktor pelaksana kebijakan tidak melaksanakan sepenuhnya apa saja yang ada di dalam peraturan yang menyebabkan kurangnya realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar terhadap target retribusi yang sudah ditentukan.

Berdasarkan beberapa gejala permasalahan tersebut penulis merasa perlu dilakukan suatu kajian tentang implementasi retribusi pelayanan pasar. Penelitian implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar ini untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar, yang harapannya dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu untuk merekonstruksi teori-teori sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah ada dan dapat menambah kepustakaan tentang kebijakan retribusi pelayanan pasar secara umumnya. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan masukan bagi instansi terkait untuk memperbaiki implementasi kebijakan sertifikasi retribusi pelayanan pasar serta memberikan informasi bagi bahan informasi bagi peneliti lain dalam meneliti permasalahan terkait di masa yang akan datang.

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik milik George C Edward III serta lima keefektifan proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Riant. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan retribusi pelayanan pasar berdasarkan teori George C Edward III yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar menggunakan paradigma penelitian konstruktivisme/*intrepretivisme* atau pendek atankualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu dengan cara membandingkan gejala yang ditemukan. Sehingga penelitian kebijakan retribusi pelayanan pasar ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif.

Adapun , situs penelitian implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasaryakni di Disperindag Kab. Pati, UPTD Pasar Puri Kab. Pati.

Penelitian ini menggunakan *nonprobability* dengan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan sample dengan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan , sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah staff Disperindag Kab Pati, dan staff UPTD Pasar Puri Kab. Pati.

Setelah informan ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan sumber data dan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Sedangkan data skunder data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca , melihat atau mendengarkan. Data-data tersebut dapat dikumpulkan melalui beberapa cara yaitu dokumentasi, wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dan interpretasi data yaitu melalui reduksi data yani data yang diperoleh dipilah sesuai dengan kebutuhan, kemudian data yang sudah dipilah disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diberikan informan dengan menggunakan analisis domain.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Proses Implementasi Kebijakan Perda No9 Tahun 2009 TentangRetribusiPelayananPasar**

##### **1. Komunikasi**

Berdasarkan beberapa hasil wawancara beberapa informan diatas diketahui bahwa pertama untuk kejelasan akan isi peraturan perda No.9 tahun 2009 tentang retribusi pelayanan pasar sudah dilaksanakan dengan baik oleh implementor dan pelaksana kebijakan. Namun menurut informan kejelasan tidak dirasakan oleh pedagang. Kedua, mengenai konsistensi pelaksanaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan hasil wawancara diatas menerangkan bahwa tidak terjadi kekonsistensian antara Disperindag dan UPTD Pasar Puri dimana implementor menghimbau untuk semua aktor pelaksana menaati kebijakan seperti menerapkan sanksi kepada pedagang yang tidak membayar retribusi, sedangkan dari UPTD Pasar Puri tidak menerapkan sanksi kepada pedagang yang tidak membayar retribusi atau terlambat membayar retribusi. Ketiga, mengenai transmisi yang dilakukan oleh Disperindag dan juga UPTD Pasar Puri cara penyampaian informasi berbeda-beda dari Disperindag melakukan musyawarah langsung dengan pedagang di Pasar Puri sedangkan dari UPTD dalam memberikan informasi kepada pedagang melalui speaker yang terpasang di sudut dan tengah pasar. Cara-cara yang sudah dilakukan

Disperindag dan juga UPTD Pasar Puri dalam upaya memberikan informasi kepada pedagang sudah dilaksanakan dengan baik tetapi masih juga ada pedagang yang tidak mematuhi peraturan yang sudah diberikan.

## 2. Sumberdaya

Berdasarkan kutipan wawancara diatas disimpulkan bahwa penyediaan fasilitas seperti komputer untuk saat ini belum dibutuhkan, di kantor UPTD Pasar Puri masih menggunakan mesin tik dalam pelaksanaan tugas. Tetapi menurut staff di Disperindag ketersediaan komputer sangat dibutuhkan untuk memperlancar tugas. Sedangkan untuk penyediaan fasilitas seperti CCTV, sepeaker, monitor untuk mengontrol kegiatan pedagang sudah tersedia dengan baik di UPTD Pasar Puri. Berbeda dengan pendapat pedagang di Pasar Puri yang kurang merasakan fasilitas, seperti jasa keamanan, kebersihan, pelayanan pasar yang menurutnya merupakan suatu bentuk fasilitas yang harus dirasakan oleh pedagang karena sudah membayar retribusi.

## 3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sikap dari pelaksana kebijakan juga sangat penting untuk terciptanya keberhasilan dari peraturan. Diperlukan tindakan yang nyata dari aparat pelaksana, dimana tindakan tersebut tercermin dari tindakan yang tegas yang dilakukan oleh kepala pasar Puri, beliau selalu memberikan surat peringatan bagi pedagang yang berjualan di daerah larangan berjualan, dan sanksinya bila pedagang tidak menyingkirkan barang dagangannya maka pihak kantor UPTD Pasar Puri tidak segan-segan untuk menyita dagangannya. Ini membuktikan sudah adanya tindakan tegas dari UPTD Pasar Puri.

## 4. Struktur Birokrasi

Tidak adanya permasalahan yang muncul oleh karena pelaksanaan kerja sama antara instansi yang terkait. Masing-masing instansi memiliki tugas dan tanggung jawab. Dan itu semua dilaksanakan dengan baik oleh DPU, Satpol PP, Kepolisian, dan masyarakat sekitar pasar Puri. Tetapi apa yang dirasakan pedagang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, pedagang masih mengeluh akan kebersihan di pasar padahal koordinasi yang dilakukan antara Disperindag dengan dinas-dinas yang terlibat sudah baik.

### **3.2 Alasan mengapa realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar lebih kecil dari target retribusi**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan alasan mengapa realisasi lebih kecil dari target retribusi ialah ketidakpahaman pedagang untuk taat dalam membayar retribusi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan retribusi, padahal sosialisasi sudah dilakukan oleh UPTD Pasar Puri. Selain itu juga sikap dari UPTD Pasar Puri dimana juru pungut tidak memungut retribusi sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan hanya 85% dari tarif yang sudah ditentukan jika pedagang merasa keberatan dalam membayar retribusi padahal di

Perda tidak dijelaskan peraturan seperti itu. Penetapan sanksi administrasi sebesar 2% bagi pedagang yang terlambat membayar retribusi juga tidak dilaksanakan oleh UPTD pasar Puri. Hal ini merupakan alasan mengapa realisasi pendapatan retribusi Pasar Puri tidak sebanding dengan target retribusi.

### 3.3 Faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan retribusi pelayanan pasar

Tabel 1. Faktor- faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar

No	Faktor yang Mendukung	Faktor yang Menghambat
1.	Implementor sudah mengikutsertakan pedagang sebagai subyek dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar	Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Diperindag dan juga UPTD Pasar Puri kepada pedagang yang rutin dilakukan ternyata tidak bisa membuat pedagang patuh untuk membayar retribusi.
2.	Implementor dan juga pelaksana kebijakan sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang	Kurangnya jumlah staff di UPTD pasar Puri membuat kepala pasar mensiasati dengan pegawai yang menduduki jabatan skertaris dan juga bendahara merangkap sebagai juru pungut.
3.	Kualitas aktor dari disperindag dan juga UPTD pasar sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, masing-masing pegawai sudah melakukan sesuai dengan tupoksinya.	Sikap dari aktor pelaksana yaitu dari UPTD Pasar Puriaktor pelaksana di UPTD Pasar Puri masih memberikan keringanan tarif yang dibayarkan dengan membayarkan 85% dari tarif yang sudah ditentukan.padahal di perda tidak ada peraturan seperti itu.
5.	Penyediaan sarana seperti SCTV dan juga <i>speaker</i> yang terpasang di area pasar menciptakan kemudahan bagi kepala pasar Puri untuk mengontrol keadaan pasar dan juga terciptanya keefektifan waktu yang dibutuhkan.	Pendelegasian wewenang tidak berjalan mulus, UPTD Pasar Puri tidak melaksanakan pungutan retribusi sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan

6.	Evaluasi sudah dilakukan oleh Disperindag maupun UPTD Pasar Puri dalam upaya pelaksanaan retribusi pelayanan pasar.	Tidak adanya ketegasan dari Disperindag akan pelaksanaan yang dilakukan UPTD juga merupakan hambatan dalam pelaksanaan perda ini.

## 4 KESIMPULAN dan REKOMENDASI

### 4.1 Kesimpulan

Implementasi Perda No.9 tahun 2009 tentang retribusi pelayanan pasar merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi pedagang. Pelayanan yang diberikan berupa ketersediaan sarana kios, los, dan pelataran sudah dirasakan oleh pedagang oleh karena pembayaran retribusi. Aktor-aktor yang bersangkutan dalam pelaksanaan Perda yaitu dari Disperindag, UPTD Pasar Puri sudah melaksanakan Perda No.9 tahun 2009 tetapi masih muncul kendala dalam pelaksanaan pungutan retribusi yang akhirnya menghambat dalam pendapatan pungutan retribusi sehingga realisasi pendapatan retribusi tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan alasan mengapa realisasi lebih kecil dari target retribusi ialah ketidakpahaman pedagang untuk taat dalam membayar retribusi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan retribusi, padahal sosialisasi sudah dilakukan oleh UPTD Pasar Puri. Selain itu juga sikap dari UPTD Pasar Puri dimana juru pungut tidak memungut retribusi sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan hanya 85% dari tarif yang sudah ditentukan jika pedagang merasa keberatan dalam membayar retribusi padahal di Perda tidak dijelaskan peraturan seperti itu. Penetapan sanksi administrasi sebesar 2% bagi pedagang yang terlambat membayar retribusi juga tidak dilaksanakan oleh UPTD pasar Puri. Hal ini merupakan alasan mengapa realisasi pendapatan retribusi Pasar Puri tidak sebanding dengan target retribusi.

### 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti memberikan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Sosialisasi bagi pedagang akan pentingnya membayar retribusi harus dilakukan secara intensif.
2. Disperindag harus memberikan himbauan kembali dengan UPTD Pasar Puri untuk menjalankan sanksi administrasi yang sebelumnya tidak dilaksanakan oleh UPTD Pasar Puri.

3. Penetapan tarif retribusi harus mengikutseratakan perwakilan pedagang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari pedagang.
4. Penyediaan fasilitas elektronik contohnya komputer untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas sehingga waktu yang dibutuhkan juga semakin singkat.
5. UPTD Pasar Puri harus menegakkan sanksi dan hukum yang tegas bagi pedagang yang terlambat atau tidak membayar retribusi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo .2008. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Indihahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta :Gava Media.
- Malano, Herman. 2011 . *Selamatkan Pasar Tradisional* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002 . *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mufiz, Ali. 2006. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Buku Materi Pokok.
- Nogi, Hessel. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Nugroho, Riant. 2009 . *Public Policy* . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus (RevisiTerbaru)*. Jakarta: CAPS.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Wordpress.
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Sumber Penelitian**

- Mahayana, Angga. 2006. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Studi Penelitian di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.

Alfafa, Jannatin. 2009. *Analisis Retribusi Pasar dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Surakarta tahun 2005-2007*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Anandita, Astrid . 2009. *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magetan*. Skripsi.Malang : Universitas Brawijaya.

### **Sumber Media Cetak**

Nugroho. (2013 ,februari 24) . *Pasar tradisional perlu penguatan*. SuaraMerdeka :7.

### **Sumber Internet**

*Bappeda Kabupaen Pati 2006-2012*

*Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. 2010 . Dalam [www.patikab.go.id](http://www.patikab.go.id). Diunduh pada 13 Oktober 2012 pukul 20.16 WIB.

Dwi, Indrawati. 2005. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) di Kabupaten Pati*. Diunduh pada 23 September 2012 pukul 19.23 WIB.

*Efektifitas Retribusi Jasa Usaha di kabupaten Pati* . Diunduh pada 31 Oktober 2012 pukul 11.24 WIB.

*Pati dalam Angka*. 2013. Dalam [patikab.bps.go.id](http://patikab.bps.go.id). Diunduh pada 12 Desember 2013 pukul 22.30 WIB.

*Profil Investasi di Kabupaten Pati*. 2010. Dalam [www.patikab.go.id](http://www.patikab.go.id). Diunduh pada 13 Oktober 2012 pukul 20.20 WIB.

*Teori-Teori Administasi Publik*. 2010 . Dalam <http://eprints.undip.ac.id/5204/>. Diunduhpada 20 Oktober 2012 pukul 9:46 WIB.

### **Sumber Regulasi**

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.